



HASTO JANJI JARING PEJABAT SECARA FAIR RPJMD Kota Yogya Dibayangi Masa Pensiun Pejabat Teras

YOGYA (KR) - Rancangan perda terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogya 2025-2029 mulai digulirkan ke lembaga legislatif. Fase awal pelaksanaan janji kampanye walikota terpilih itu pun bakal dibayangi dengan masa pensiun pejabat teras di lingkungan Pemkot Yogya.

Wakil Ketua Fraksi Nas-Dem DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, mengungkapkan pihaknya menaruh perhatian serius terkait rancangan perda RPJMD tersebut. Hal ini karena dalam RPJMD tertuang program-program strategis yang menjadi visi misi kepala daerah selama kepemimpinannya di Pemkot Yogya. "Kami di lembaga dewan tentu harus memberikan dukungan serta mengawal agar program pembangunan dapat berjalan optimal. Sehingga pejabat vital yang akan menjalankan birokrasi harus dipersiapkan betul. Jangan sampai pada fase awal RPJMD bergulir justru terjadi dinamika internal di eksekutif karena pejabatnya pensiun," urainya, Selasa (20/5).

Menurutnya manajemen dalam tata kelola pengisian pegawai di lingkungan Pemkot Yogya sebenarnya sudah sangat baik. Terutama dengan diterapkannya sistem merit dan manajemen talenta. Dengan begitu seluruh calon pejabat sudah memiliki skor dari aspek kompetensi dan hasil kinerja. Sehingga hal itu akan memudahkan bagi Pemkot dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensinya.

Akan tetapi di sisi lain Dwi Candra yang duduk di Komisi A juga menyoroti sejumlah posisi struktural yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Baik pejabat eselon II atau setara kepala dinas maupun eselon III seperti kepala

bidang maupun kepala seksi. "Adanya Plt ini berarti menandakan kekosongan jabatan struktural. Jika dikembalikan ke sistem merit maupun manajemen talenta, seharusnya itu sudah bisa teratasi. Tapi kenapa kekosongan itu masih juga terjadi sampai saat ini?," tanyanya.

Dwi Candra menambahkan, sesuai ketentuan kepala daerah memang dibatasi kewenangannya dalam merotasi pejabat dalam jangka waktu enam bulan setelah dilantik. Akan tetapi hal itu pun tetap bisa dilakukan dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Terlebih sejumlah pejabat teras di Kota Yogya bakal memasuki masa pensiun pada tahun depan. Sebut saja Sekda Kota Yogya yang akan pensiun pada awal 2026. Kemudian disusul Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian yang akan pensiun pada medio 2026. Sedangkan Asisten Bidang Administrasi Umum akan pensiun pada 2027.

"Masa pensiun para pejabat teras itu pun terjadi pada fase awal RPJMD Kota Yogya dilaksanakan. Ini harus dipersiapkan betul agar pejabat yang

akan melanjutkan ada kesinambungan. Siapa saja yang memenuhi kompetensi juga sudah terlihat dari sistem merit dan manajemen talenta. Kalau sedikit-sedikit diisi oleh Plt, menjadi tidak optimal," paparnya.

Menanggapi hal itu Wali Kota Yogya Hasto Wardoyo, justru memilih untuk tidak buru-buru dalam mempersiapkan calon pejabat. Dirinya mengaku sudah terbiasa dalam proses penataan pejabat teras. Dicontohkannya pada saat menjabat Kepala BKKBN, proses penggantian deputi biasanya baru ia lakukan pada empat hingga lima bulan sebelum jabatan itu kosong akibat masa pensiun.

"Saya sudah biasa kok. Nanti lima atau empat bulan sebelumnya kita proses. Biasanya lewat bidding (seleksi) supaya lebih fair," katanya. Begitu pula dalam jabatan Sekda sebagai pengendali utama birokrasi sekaligus pejabat tertinggi di lingkungan ASN Kota Yogya. Menurut Hasto, memilih sosok Sekda juga bukan hanya satu orang. Dirinya pun memberikan gambaran perihal sosok Sekda yang harus mampu mengayomi semua pihak serta memiliki kompetensi tinggi. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005